



Pembelajaran Sejarah Berbasis Inklusi di SMA Negeri 9 Surakarta

Aisna Chantika Aslinda^{1*}, Musa Pelu²

^{1,2} Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

*Email: aisnachantika@student.uns.ac.id¹, musapelu@staff.uns.ac.id²

* Penulis Korespondensi: aisnachantika@student.uns.ac.id

Abstract. *This study examines inclusive history learning at SMA Negeri 9 Surakarta, focusing on planning, implementation, and the barriers and solutions in implementing inclusive education. The objective was to determine how history learning is implemented to support educational services for students with special needs (ABK). The study employed a qualitative approach with a case study method, with data collection techniques including interviews, observation, and documentation, analyzed descriptively. The results indicate that inclusive education planning is implemented through the equal implementation of the Merdeka Curriculum (Independent Curriculum) without a specific curriculum for ABK, with technical learning adjustments that take into account the characteristics of ABK as athletes with disabilities under the Ministry of Youth and Sports. History learning utilizes the same learning modules, along with adjustments to methods, flexibility in time, and the use of Google Classroom. Obstacles that emerged included limited learning time, limited infrastructure, the lack of Special Assistance Teachers (GPK), and uneven distribution of inclusive training. Solutions implemented included flexible learning, group work, technology utilization, teacher competency development, and collaboration with the NPCI (National Institute of Indonesia). Overall, inclusive education at SMA Negeri 9 Surakarta operates adaptively to meet the needs of students.*

Keywords: *Athletes with Disabilities; History Learning; Inclusive Education; Independent Curriculum; SMA Negeri 9 Surakarta.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji pembelajaran sejarah berbasis inklusi di SMA Negeri 9 Surakarta dengan fokus pada perencanaan, pelaksanaan, serta hambatan dan solusi dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pembelajaran sejarah dalam mendukung layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus (ABK). Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan pendidikan inklusi dilaksanakan melalui penerapan Kurikulum Merdeka secara setara tanpa kurikulum khusus bagi ABK, dengan penyesuaian teknis pembelajaran yang mempertimbangkan karakteristik ABK sebagai atlet tunadaksa binaan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Pelaksanaan pembelajaran sejarah menggunakan modul ajar yang sama, disertai penyesuaian metode, fleksibilitas waktu, dan pemanfaatan Google Classroom. Hambatan yang muncul antara lain keterbatasan waktu belajar, sarana prasarana, belum tersedianya Guru Pendamping Khusus (GPK), serta pelatihan inklusi yang belum merata. Solusi yang dilakukan meliputi pembelajaran fleksibel, kerja kelompok, pemanfaatan teknologi, peningkatan kompetensi guru, dan kolaborasi dengan NPCI. Secara keseluruhan, pendidikan inklusif di SMA Negeri 9 Surakarta berjalan secara adaptif sesuai kebutuhan peserta didik.

Kata kunci: Atlet Disabilitas; Kurikulum Merdeka; Pembelajaran Sejarah; Pendidikan Inklusi; SMA Negeri 9 Surakarta.

1. LATAR BELAKANG

Pendidikan merupakan hak fundamental setiap warga negara tanpa terkecuali, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus (ABK) (Ayu Rinata et al., 2025). Hak ini dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Sebagai bentuk implementasi hak tersebut, pemerintah mengembangkan sistem pendidikan inklusif yang memberikan kesempatan bagi seluruh peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan yang setara tanpa diskriminasi (Novaranti et al., 2025). Melalui pendidikan inklusif, peserta didik berkebutuhan

husus dapat belajar bersama peserta didik reguler dalam lingkungan sekolah yang sama, sekaligus tetap memperoleh layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan individual mereka.

Komitmen terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia semakin diperkuat dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menegaskan bahwa setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan yang bermutu dan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan sistem layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk ABK, untuk belajar bersama-sama di lingkungan pendidikan yang sama (Sudarto 2016). Pendidikan inklusi tidak hanya berfokus pada akses masuk ke sekolah reguler, tetapi juga pada terciptanya lingkungan belajar yang mendukung partisipasi, keterlibatan, dan keberhasilan belajar seluruh peserta didik (Ainscow, 2020).

Dalam konteks pembelajaran sejarah, pendidikan inklusi memainkan peran penting. Mata pelajaran sejarah tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan tentang peristiwa masa lalu, kesadaran historis, dan nilai kebangsaan (Maharani et al., 2025; Ruth Agustaria et al., 2025). Penerapan pendidikan inklusif pada pembelajaran sejarah menjadi penting agar seluruh peserta didik, termasuk ABK, memperoleh pengalaman belajar yang bermakna dan setara (Halda Nor Halisa, 2024). Pembelajaran sejarah mengembangkan kemampuan berpikir kritis, rasa nasionalisme, dan toleransi yang relevan bagi semua peserta didik tanpa terkecuali.

SMA Negeri 9 Surakarta adalah salah satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif yang resmi ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Sekolah ini mulai beroperasi pada tahun ajaran 2024/2025. Keistimewaan dari sekolah ini terletak pada profil anak berkebutuhan khusus (ABK) yang diterima. Sekolah ini menerima atlet penyandang tunadaksa yang dibina oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Kondisi ini menciptakan dinamika unik yang membedakannya dari sekolah inklusif lainnya.

Karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus yang dimiliki SMA Negeri 9 Surakarta menjadikan sekolah ini menarik untuk dikaji dalam konteks pendidikan inklusi. Selain itu, pembelajaran sejarah sebagai mata pelajaran yang menanamkan nilai kemanusiaan, toleransi, dan penghargaan terhadap keberagaman memiliki peran penting dalam mendukung terwujudnya lingkungan belajar yang inklusif. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan pendidikan inklusi, implementasi pendidikan inklusi dalam pembelajaran sejarah, serta hambatan dan solusi yang ditemukan dalam pelaksanaannya di SMA Negeri 9 Surakarta.

Dalam konteks pembelajaran sejarah, penerapan pendidikan inklusif memiliki urgensi yang tinggi karena proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada penguasaan materi, tetapi juga pada pembentukan nilai-nilai kemanusiaan, sikap toleran, serta penghargaan terhadap keberagaman. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan dan pelaksanaan pendidikan inklusif, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dan solusi yang dikembangkan dalam penerapan pendidikan inklusif pada pembelajaran sejarah di SMA Negeri 9 Surakarta.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena penerapan pendidikan inklusi dalam pembelajaran sejarah di SMA Negeri 9 Surakarta. Metode studi kasus digunakan untuk mengkaji secara rinci kondisi, proses, serta berbagai aspek yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan inklusi pada lokasi penelitian. Penelitian dilaksanakan di SMA Negeri 9 Surakarta, Jl. Kyai Mojo Gang Serang RT 02 RW 02, Kelurahan Mojo, Kecamatan Pasar Kliwon, Kota Surakarta. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa SMA Negeri 9 Surakarta merupakan salah satu penyelenggara pendidikan inklusif yang menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Selain itu, sekolah ini memiliki karakteristik yang khas karena peserta didik inklusinya merupakan atlet penyandang tunadaksa yang berada di bawah binaan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Menurut (Undari Sulung, 2024) Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber aslinya melalui responden atau informan yang berkaitan dengan variabel penelitian, tanpa melalui proses pengolahan sebelumnya. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap guru sejarah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, peserta didik berkebutuhan khusus (ABK), serta peserta didik reguler. Menurut (Innayah Amelia et al., 2016) Sumber data sekunder dapat diperoleh dari pihak yang memiliki keterkaitan dengan data penelitian dan berbagai referensi yang sesuai dengan tema penelitian, data sekunder dihimpun melalui studi dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pembelajaran sejarah di SMA Negeri 9 Surakarta.

Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan teknik penentuan informan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian. Oleh karena itu,

informan yang dipilih dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan pendidikan inklusi di SMA Negeri 9 Surakarta. Keabsahan data dalam penelitian ini diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan studi dokumen sehingga diperoleh data yang lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Sekolah dan Karakteristik Pendidikan Inklusi di SMA Negeri 9 Surakarta

SMA Negeri 9 Surakarta diresmikan pada 3 Juni 2024 oleh Gubernur Jawa Tengah sebagai hasil kolaborasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kota Surakarta. Dibangun di atas lahan hibah Pemerintah Kota Surakarta yang sebelumnya merupakan lokasi SD Mojo, sekolah ini memiliki 26 tenaga pendidik, 15 rombongan belajar, 15 ruang kelas, dan 540 peserta didik. Sebagai sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, SMA Negeri 9 menerima 17 peserta didik berkebutuhan khusus yang merupakan atlet penyandang tunadaksa binaan Kemenpora berdasarkan nota kesepahaman (MoU) antara sekolah dan Kemenpora.

SMA Negeri 9 Surakarta merupakan salah satu sekolah penyelenggara pendidikan inklusif di Kota Surakarta. Peserta didik berkebutuhan khusus (ABK) yang bersekolah di sini merupakan atlet penyandang disabilitas binaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora). Kehadiran peserta didik tersebut didasarkan pada kerja sama (Memorandum of Understanding/MoU) antara pihak sekolah dan Kemenpora yang bertujuan menyediakan layanan pendidikan yang layak dan berkualitas bagi atlet penyandang disabilitas tanpa mengabaikan hak mereka untuk memperoleh pendidikan formal.

Visi SMA Negeri 9 Surakarta adalah "Terwujudnya Peserta Didik Yang Beriman Dan Bertaqwa, Bersolidaritas, Tangguh, Inovativ, Mandiri, Edukatif, Dan Berwawasan Global." Misi sekolah mencakup pelaksanaan pembelajaran holistik yang menitikberatkan pendidikan akhlak dan budi pekerti, penciptaan lingkungan belajar yang menyenangkan dan menghargai keberagaman, serta penerapan manajemen perubahan berbasis aset sebagai strategi percepatan pengembangan sekolah.

Perencanaan Pendidikan Inklusi dalam Pembelajaran Sejarah

Perencanaan pendidikan inklusi di SMA Negeri 9 Surakarta menunjukkan karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sekolah inklusi pada umumnya. Perbedaan tersebut berkaitan dengan karakteristik peserta didik ABK yang bersekolah di SMA Negeri 9 Surakarta. Peserta didik ABK di sekolah ini merupakan atlet penyandang tunadaksa binaan Kemenpora. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap perencanaan layanan pendidikan inklusi yang diterapkan sekolah, termasuk dalam aspek kurikulum, pembelajaran, dan dukungan akademik bagi peserta didik.

Perencanaan pendidikan inklusif di SMA Negeri 9 Surakarta dilandasi prinsip kesetaraan pada kurikulum, sekolah menerapkan Kurikulum Merdeka yang sama bagi seluruh peserta didik reguler maupun peserta didik ABK. Kurikulum Merdeka yang diterapkan di SMA Negeri 9 Surakarta telah memenuhi prinsip-prinsip pendidikan inklusi sehingga tidak diperlukan kurikulum terpisah bagi peserta didik ABK. Pengecualian hanya berlaku pada mata pelajaran Pendidikan Jasmani yang disesuaikan dengan kondisi fisik peserta didik tunadaksa. Kebijakan ini sejalan dengan Permendikbud Nomor 157 Tahun 2014 yang memperbolehkan ABK tanpa hambatan intelektual mengikuti kurikulum reguler secara penuh.

Guru sejarah kelas E-3, menegaskan bahwasanya dalam kurikulum tidak ada perbedaan antara siswa disabilitas dan non-disabilitas. Semua peserta didik diperlakukan sama rata tanpa batasan apapun. Pernyataan ini diperkuat oleh Waka Kurikulum yang menyatakan bahwa Kurikulum Merdeka yang diterapkan di SMA Negeri 9 Surakarta telah memenuhi prinsip-prinsip pendidikan inklusi sehingga tidak diperlukan kurikulum terpisah bagi peserta didik ABK. Pengecualian hanya diberikan pada mata pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (PJOK) yang disesuaikan dengan kondisi fisik peserta didik tunadaksa. Perencanaan kebijakan pendidikan inklusi yang efektif harus mencakup kesiapan kurikulum, kompetensi tenaga pendidik, serta penyediaan sarana prasarana yang mendukung pelayanan peserta didik berkebutuhan khusus secara menyeluruh (Lukitasari et al., 2017). Berdasarkan hasil penelitian, peserta didik ABK di SMA Negeri 9 Surakarta memiliki kemampuan intelektual yang setara dengan peserta didik reguler. Dengan demikian, penggunaan kurikulum yang sama tidak sekadar merupakan kebijakan administratif, melainkan bentuk penyesuaian yang selaras dengan karakteristik peserta didik.

Karakteristik khusus SMA Negeri 9 Surakarta sebagai sekolah inklusi terletak pada mayoritas peserta didik ABK penyandang tunadaksa yang juga merupakan atlet binaan Kemenpora dari berbagai daerah, yang berprestasi di bidang olahraga pada tingkat kota hingga nasional sehingga prestasi non-akademik tersebut menjadi nilai tambah yang menutupi

kekurangan dalam pembelajaran, menciptakan lingkungan sekolah yang lebih inklusif, serta menghadirkan pengakuan sosial dari teman sebaya dan mencegah munculnya sikap merendahkan maupun perlakuan diskriminatif. Akomodasi pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus dilakukan dengan mendengarkan dan menerima masukan dari para siswa. Namun, temuan penelitian ini memperkaya kajian tersebut dengan menunjukkan bahwa akomodasi tidak hanya bersifat responsif terhadap kebutuhan belajar, tetapi juga terhadap jadwal latihan atletik yang padat (Martono, 2024).

Guru sejarah di SMA Negeri 9 Surakarta melakukan penyesuaian pembelajaran bagi peserta didik ABK bukan pada materi, tetapi pada teknis pelaksanaan, seperti mekanisme pembagian kelompok dan tata cara presentasi yang tidak mengharuskan mereka berpindah tempat. Desain pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di kelas inklusif dikembangkan berdasarkan model pembelajaran kolaboratif dengan tiga prinsip, yaitu fleksibilitas, modifikasi, dan dukungan (Sunanto, 2016). Serta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang menekankan akomodasi wajar melalui modifikasi prosedur, bukan perubahan substansi kurikulum.

Untuk menyesuaikan kebutuhan peserta didik ABK yang harus pulang setiap hari pukul 12.00 WIB untuk mengikuti latihan atletik, sekolah telah memanfaatkan Google Classroom sebagai media pembelajaran daring. Penggunaan teknologi ini menunjukkan bahwa sekolah berusaha menyesuaikan proses pembelajaran agar peserta didik ABK tetap dapat mengikuti pelajaran dan mencapai target yang telah ditetapkan. Upaya lain dalam perencanaan adalah peningkatan kompetensi guru yang dilakukan secara rutin. SMA Negeri 9 Surakarta secara konsisten mengirimkan perwakilan guru untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) pendidikan inklusi setiap tahun sekali. Upaya ini mencerminkan komitmen institusional terhadap pengembangan profesionalisme guru dalam pengelolaan kelas inklusif. Menurut (Van Mieghem, dkk. 2020 hlm: 675-689) pengembangan profesional guru merupakan salah satu tema utama dalam riset pendidikan inklusi global dan menjadi faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi inklusi di tingkat kelas. Guru yang telah mendapatkan pelatihan inklusi secara konsisten terbukti lebih siap dalam mengidentifikasi kebutuhan peserta didik ABK, merancang strategi pembelajaran yang responsif, serta membangun hubungan pedagogis yang konstruktif dengan seluruh peserta didik.

Meskipun pelatihan ini belum diikuti oleh seluruh guru, mekanisme pengembangan kompetensi yang terstruktur dan rutin menandakan bahwa sekolah memahami pentingnya peningkatan kapasitas pedagogis agar selaras dengan kebutuhan peserta didik yang terus berkembang. Menurut (Novembli & Hasanah, 2024, hlm 6) pemberian pelatihan pendidikan

inklusif dapat meningkatkan sikap dan pengetahuan guru dalam mengajar siswa penyandang disabilitas. (Martono, 2024, hlm 1) juga menemukan bahwa minimnya pelatihan guru terkait implementasi pendidikan inklusif menjadi penyebab utama kekhawatiran guru dalam memberikan dukungan bagi peserta didik berkebutuhan khusus.

Pelaksanaan Pembelajaran Sejarah Berbasis Inklusi

Implementasi pendidikan inklusif dalam pembelajaran sejarah di SMA Negeri 9 Surakarta diwujudkan melalui perlakuan yang setara antara peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus (ABK). Guru sejarah di kelas E-3 dan F-1 menggunakan modul ajar yang sama untuk semua peserta didik tanpa pembedaan. Kelas E-3 mempelajari mata pelajaran Sejarah dengan topik Masuknya Islam di Nusantara, sedangkan kelas F-1 mempelajari materi Kolonialisme dan Perlawanan Bangsa Indonesia. Pada kedua kelas tersebut, modul ajar yang digunakan tetap sama dan diterapkan bagi seluruh peserta didik.

Pembelajaran sejarah di kelas inklusi dilakukan melalui kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi kelompok. Peserta didik berkebutuhan khusus (ABK) mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti semua rangkaian pembelajaran. Ini termasuk kegiatan diskusi, presentasi, dan evaluasi. Penyesuaian yang dilakukan guru bersifat teknis, seperti pengaturan tempat duduk untuk mendukung mobilitas peserta didik tunadaksa dan memberikan kesempatan presentasi dari tempat duduk. Dalam kegiatan diskusi kelompok, strategi yang digunakan disesuaikan dengan kondisi kelas. Ini bisa dilakukan melalui pengelompokan campuran antara peserta didik ABK dan reguler, atau pengelompokan berdasarkan kenyamanan peserta didik. Selain itu, sistem penilaian diterapkan secara setara kepada semua peserta didik tanpa membedakan status ABK dan reguler. Penyesuaian hanya dilakukan pada pelaksanaan tugas tertentu, dengan mempertimbangkan jadwal latihan atletik peserta didik ABK, tanpa mengurangi standar capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Implementasi inklusi yang efektif bukan sekadar kehadiran fisik ABK di kelas reguler, melainkan penciptaan kondisi pembelajaran di mana setiap peserta didik merasa diterima, dihargai, dan mampu berkontribusi bermakna (Ainscow, 2020).

Interaksi sosial antara peserta didik reguler dan peserta didik berkebutuhan khusus (ABK) di SMA Negeri 9 Surakarta berjalan dengan baik. Peserta didik ABK diterima oleh teman-temannya dan tidak mengalami perlakuan diskriminatif di sekolah. Situasi ini didukung oleh prestasi yang dimiliki peserta didik ABK sebagai atlet nasional. Hal ini menumbuhkan rasa kagum dan penghargaan dari peserta didik reguler. (Nissa Tarnoto 2016, hlm.57)

Penerimaan sosial peserta didik ABK di sekolah inklusif dipengaruhi oleh persepsi positif teman sebaya terhadap kemampuan yang dimiliki. Penerimaan sosial yang baik tersebut turut menciptakan suasana belajar yang kondusif dan mendukung keterlibatan peserta didik ABK dalam proses pembelajaran.

Pelaksanaan pendidikan inklusif di SMA Negeri 9 Surakarta didukung melalui kerja sama dengan National Paralympic Committee Indonesia (NPCI). Keberadaan guru pamong membantu sekolah memperoleh informasi mengenai kondisi dan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus (ABK), sehingga layanan pendidikan dapat disesuaikan dengan karakteristik masing-masing peserta didik, menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak hanya bergantung pada peran sekolah semata, tetapi juga membutuhkan dukungan berbagai pihak lain yang terlibat dalam proses pembinaan peserta didik ABK.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini mengkaji pembelajaran sejarah yang berbasis inklusi di SMA Negeri 9 Surakarta. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa perencanaan pendidikan inklusif dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip kesetaraan melalui penerapan Kurikulum Merdeka yang seragam untuk semua peserta didik. Sekolah tidak mengimplementasikan kurikulum khusus untuk ABK, tetapi melakukan penyesuaian pada aspek teknis pembelajaran. Penyediaan Google Classroom dan pelatihan inklusi secara berkala menjadi bentuk dukungan dari sekolah dalam mewujudkan layanan pendidikan yang inklusif.

Pelaksanaan pembelajaran sejarah di kelas E-3 dan F-1 menunjukkan bahwa guru mampu menciptakan pembelajaran yang inklusif melalui perlakuan yang setara, penyesuaian pembelajaran sesuai kebutuhan, serta interaksi sosial yang positif. Keberadaan ABK sebagai atlet berprestasi turut mendukung terciptanya lingkungan sekolah yang menerima keberagaman dan mengurangi potensi diskriminasi. Kerja sama dengan NPCI juga memperkuat dukungan terhadap keberlangsungan pendidikan inklusif di sekolah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan inklusif bersifat kontekstual dan dinamis sesuai dengan kondisi peserta didik dan lingkungan sekolah. Adapun saran yang dapat diberikan yaitu sekolah perlu meningkatkan layanan inklusi melalui penyediaan Guru Pendamping Khusus (GPK), pemerataan pelatihan inklusi bagi guru, serta pengembangan fasilitas yang ramah disabilitas. Guru juga diharapkan terus mengembangkan strategi pembelajaran yang adaptif, sedangkan penelitian selanjutnya dapat mengkaji pengalaman ABK secara lebih mendalam dalam mengikuti pembelajaran di sekolah inklusi.

DAFTAR REFERENSI

- Ainscow, M. (2020). Promoting inclusion and equity in education: lessons from international experiences. *Nordic Journal of Studies in Educational Policy*, 6(1), 7–16. <https://doi.org/10.1080/20020317.2020.1729587>
- Ayu Rinata, et al. (2025). Gambaran Pengembangan Kepercayaan Diri pada Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) di SMA “X” Kabupaten Gresik. *Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi.*, 3(2). <https://doi.org/10.61132/observasi.v3i2.1156>
- Halda Nor Halisa, E. W. (2024). Implementasi Modul Ajar Dalam Pembelajaran Sejarah Di Era Kurikulum Merdeka Pada Kelas X SMA Negeri 2 Banjarmasin. <https://ejournal.unibabwi.ac.id/index.php/santhet>
- Innayah Amelia, Mustofa Zamzam, & Mukminin Amir. (2016). Upaya peningkatan keterampilan siswa melalui program kelas keterampilan tkr (kecantikan kulit dan rambut) dan tokr (teknik otomotif dan kendaraan) di man 2 ngawi. *Jurnal Tawadhu*, 7(1), 1–23.
- Lukitasari, S. W., Sulasmono, B. S., & Iriani, A. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 121. <https://doi.org/10.24246/j.jk.2017.v4.i2.p121-134>
- Maharani, et al. (2025). IMPLEMENTASI PENDIDIKAN INKLUSI DI SDN 05 NGALIYAN: STUDI KASUS ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS SLOW LEARNER. *NALAR: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 3(2). <https://doi.org/10.56444/nalar.v3i2.1737>
- Martono, S. F. (2024). Akomodasi pembelajaran bagi siswa berkebutuhan khusus pada sekolah inklusif jenjang SMA/SMK di Kota Surakarta. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Khatulistiwa*, 13, 11.
- Nissa Tarnoto. (2016). Permasalahan-Permasalahan yang Dihadapi Sekolah Inklusi. *Humanitas*, 13 No.1(1693–7236), 50–61.
- Novaranti Zura Dwiputri, et al. (2025). Peran Hukum dalam Menjamin Akses Pendidikan Inklusif melalui Kebijakan Publik. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 3(2). <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v3i2.5219>
- Novembli, M. S., & Hasanah, N. (2024). Transformasi Sikap dan Pemahaman Guru terhadap Siswa Disabilitas Melalui Pelatihan Pendidikan Inklusi. *Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran*, 57(3), 666–675. <https://doi.org/10.23887/jpp.v57i3.79964>
- Ruth Agustaria, et al. (2025). Peran dan Tantangan Guru dalam Pendidikan Inklusi. *Jurnal Ilmu Pendidikan, Bahasa, Sastra dan Budaya*, 3(4). <https://doi.org/10.61132/morfologi.v3i4.1956>
- Sudarto, Z. (2016). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. *Jurnal Pendidikan*, 90.
- Sunanto, J. dan H. (2016). Desain Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus. *Jassi Anakku*, 17(1), 47–55.

- Undari Sulung, M. M. (2024). Jurnal Edu Research Indonesian Institute for Corporate Learning and Studies (IICLS) Page 25. *Jurnal Edu Research: Indonesian Institute for Corporate Learning and Studies (IICLS)*, 5(2), 28–33.
- Van Mieghem, A., Verschueren, K., Petry, K., & Struyf, E. (2020). An analysis of research on inclusive education: A systematic search and meta review. *International Journal of Inclusive Education*, 24(6), 675-689. <https://doi.org/10.1080/13603116.2018.1482012>